

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa serta penelitian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Musi Banyuasin Tahun 2014-2019 dinilai sudah cukup baik.

Pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi dilihat dari indikator responsivitas dinilai sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasil disepakatinya 2 (dua) Perda yang berkaitan dengan gender, dan anak. Sedangkan dilihat dari indikator akuntabilitas, politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi sudah sesuai dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selain itu politisi perempuan dinilai sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Serta dilihat dari indikator efektivitas, dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya politisi perempuan di DPRD Musi Banyuasin dinilai dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan.

Pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran dilihat dari indikator responsivitas, politisi perempuan berhasil menetapkan besaran anggaran untuk mendukung program-program peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak, serta memberikan kepercayaan kepada SKPD untuk mengelola anggaran tersebut. Politisi perempuan bersama-sama

memperjuangkan hal yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak di Musi Banyuasin . Sehingga dapat menjadi sebuah kebijakan dan mendorong dalam segi anggaran. Dengan adanya politisi perempuan di DPRD Musi Banyuasin dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan.

Pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator responsivitas, dinilai sudah baik. Politisi perempuan aktif dan mampu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta melaksanakan pengawasan APBD oleh SKPD secara langsung. Berikutnya, kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator akuntabilitas dinilai sudah akuntabel. Hal tersebut dilihat dari besarnya peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Musi Banyuasin. Terakhir, kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator efektivitas dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya peran politisi perempuan dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan, serta efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Musi Banyuasin .

B. Saran

1. Pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif agar dapat memperjuangkan aspirasi perempuan, dan meningkatkan pemahaman

perempuan terhadap politik. Perempuan tidak hanya sekedar mencalegkan diri namun akan menjadi baik jika berpolitik tidak sekedar ikut-ikutan saja melainkan ada niat dan keinginan dari diri sendiri.

2. Memberikan pendidikan politik kepada perempuan dalam melakukan pendidikan yang berspektif gender dan isntunsi, untuk mendorong politik perempuan sehingga terpilih menjadi anggota.